

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Kinerja dan Pengukuran Kinerja

2.1.1 Kinerja

Kinerja adalah suatu deskripsi akan tingkat pencapaian atau *performance* dalam praktik suatu kebijakan, program dan kegiatan, dalam mencapai misi dan visi organisasi. Istilah kinerja juga populer dengan kata tingkat pencapaian orang pribadi atau bahkan sebuah organisasi. Kinerja bisa diketahui ataupun jika memang ada kriteria tertentu untuk suatu keberhasilan. Jika tidak ada target ataupun tujuan yang ditetapkan maka tidak akan bisa diketahui kinerja atau pencapaian atau *performance* individu ataupun kelompok karena tidak ada yang bisa menjadi tolok ukurnya.

Indikator akan suatu kinerja adalah mengukur baik itu kuantitas dan kualitas dalam menuju suatu capaian. Indikator kinerja yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria (Medica, 2016), antara lain:

- a. Spesifik berarti harus jelas dan terdefinisi dengan baik

- b. Terukur berarti harus dapat diukur secara nyata dan objektif.
- c. harus realistis dan dalam lingkup kendali organisasi.
- d. Relevan berarti harus mencerminkan hasil yang diukur.
- e. Berjangka Waktu Tertentu berarti harus memiliki waktu yang jelas untuk pencapaian

Mardiasmo (2009) menyebutkan beberapa peranan indikator kinerja bagi pemerintah:

1. Memperjelas arah yang harus dicapai sebuah organisasi
2. Evaluasi target akhir yang dicapai
3. Masukan untuk penentuan skema insentif manajerial
4. Pilihan untuk pemakai jasa pelayanan pemerintah
5. Standar kinerja
6. Penunjukan Efektivitas
7. Penentuan aktivitas dengan efektifitas biaya minimal dalam mencapai target sasaran
8. Untuk memberikan gambaran terbaik dalam menekan pengeluaran biaya.

2.1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memotivasi dan memberikan dorongan individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, dan kualitas barang serta jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, pengukuran kinerja mencakup

evaluasi menyeluruh yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan public (Khikmah, 2016).

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan sebuah sistem untuk memudahkan pemangku kepentingan melakukan penilaian atas pencapaian. Pengukuran Kinerja pun dijadikan sebagai sebuah alat kontrol organisasi melalui sistem *reward and punishment*.

Manfaat pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan (Mardiasmo, 2009):

1. penilaian kinerja manajemen
2. Sebagai arah acuan dalam pencapaian target
3. Monitoring dan evaluasi
4. Dasar penentuan *reward and punishment* yang objektif
5. Alat komunikasi antara lini paling bawah ke atas dalam organisasi
6. Identifikasi kepuasan masyarakat
7. Pemahaman proses atau alur dalam organisasi
8. Keputusan yang objektif

Dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, beberapa indikator yang menjadi beberapa kategori:

a. Indikator *Input*

Mengukur sumber daya yang digunakan, seperti jumlah dana, pegawai, dan infrastruktur.

b. Indikator Proses

Menilai metode dan cara pelaksanaan kegiatan.

c. Indikator *Output*

Mengukur hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah layanan yang diberikan.

d. Indikator *Outcome*

Menilai dampak dari hasil kegiatan terhadap masyarakat

e. Indikator *Impact*

Mengukur perubahan jangka panjang yang dihasilkan dari program atau kebijakan

2.1.3 Kinerja Anggaran

Anggaran kinerja disusun dengan menggunakan acuan pada target yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan sejumlah dana yang telah dianggarkan. Menurut Sony Yuwono dkk (2005:34) adalah anggaran haruslah ditekankan dalam upaya pendayagunaan dengan tidak menomorduakan hasil yang sesuai harapan”.

Penganggaran berdasarkan acuan kinerja ini sebagai alat ukur dalam menyiapkan pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi kepada khalayak umum nantinya. Program-program yang dibuat dalam penganggaran berdasarkan instrument kinerja sebagai Langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Aktivitas setiap program yang disusun untuk mencapai setiap target pertahunnya yang berisi rencana kegiatan operasional merupakan komponen yang digunakan dalam penganggaran ini.

Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja:

1. Capaian yang diinginkan
2. Informasi yang digunakan dapat diandalkan dan dibandingkan
3. Informasi yang tersedia dan lengkap

Kondisi organisasi yang diperlukan dalam implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Tanggungjawab setiap lini organisasi
2. Administrasi yang baik
3. Sumber daya yang cukup
4. Sistem *reward and punishment*
5. Solidaritas dalam mencapai tujuan.

2.2 Value for Money

Value for money (VFM) adalah konsep yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran publik memberikan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan fokus pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terkhusus untuk organisasi di sektor publik. Menurut (Mardiasmo, 2009), *VFM* mengedepankan penggunaan input yang minimal untuk mencapai hasil yang sesuai harapan, sehingga penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini dalam setiap program dan kebijakan.

Mardiasmo (2009) menyebutkan pembagian indikator-indikator dalam konsep *Value for money* menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya. Dalam indikator ini usaha mendapatkan barang dan ataupun jasa pada harga terbaik untuk hasil yang terbaik juga disebut ekonomis. Sedangkan suatu hasil/output yang dicapai dengan sumber daya seminimal mungkin disebut efisiensi.
2. Indikator kualitas pelayanan sebagai cerminan dari peran output hasil/keluaran dalam mencapai target yang telah direncanakan.

2.2.1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran Ekonomi yang dinyatakan Mardiasmo (2002:133), berfokus pada input sumber daya yang digunakan. Menurut Mahsun (2006:179) ekonomis juga dapat disimpulkan sebagai suatu penghindaran dari pemborosan. Pengukuran tingkat ekonomi yang dilakukan menggunakan data anggaran dan realisasi yang dikeluarkan. Ekonomisnya kinerja suatu organisasi bisa dilihat dari target anggaran yang harus lebih besar dari realiasi sebenarnya. Menurut Mohamad Mahsun (2013:188) tingkat ekonomi dihitung dengan melibatkan komponen anggaran belanja dan realisasi belanja sebenarnya. Berikut rumus pengukuran kriteria ekonomis.

Tabel 2. 1 Kriteria Ekonomis

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
------------------	-------	---------------	------------

Ekonomi	$\frac{\text{Input Rencana (Anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$	>100%	Ekonomis
		85-100%	Cukup Ekonomis
		65-84%	Kurang Ekonomis
		65%	Tidak Ekonomis

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015

2.2.2 Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009:133) Pengukuran efisiensi dengan menggunakan perbandingan antara *Output*/keluaran dengan *Input*/sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun dalam batas normal. Jika suatu organisasi menggunakan input sumber daya yang minimal dan dapat mencapai hasil sesuai dengan target maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi yang dihasilkan. Proses kegiatan dikatakan efisien ketika jika suatu hasil kerja diwujudkan melalui sumber input yang minimal mungkin.

Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efisiensi	$\frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$	<90%	Sangat Efisien
		90-99%	Efisien
		100%	Cukup Efisien
		>100%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015

2.2.3 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan. Pada umumnya, Efektivitas menilai suatu kegiatan telah mencapai targetnya. Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektivitas menyebutkan relasi antara output/keluaran dengan tujuan atau target.

Tabel 2. 3 Kriteria Efektivitas

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Efektivitas	$\frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$	$\geq 100\%$	Efektif
		85-99%	Cukup Efektif
		65-84%	Kurang Efektif
		$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015

2.1.3 Pentingnya *Value for money* dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Prinsip *Value for money* (VFM) berperan penting dalam pengelolaan anggaran terkhusus pada lini sektor publik karena memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan mengapa VFM itu penting antara lain:

1. Akuntabilitas Publik

VFM mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bagaimana dana publik digunakan dan hasil yang dicapai, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Mahar Putro Dito, 2022).

2. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien

Prinsip VFM menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dengan fokus pada hasil dan dampak, pemerintah dapat meminimalkan pemborosan dan setiap penggunaan rupiah menghasilkan suatu keluaran (Al-Hakim & Harnovinsah, 2019), (Nur Surachman Eko Widyaishwara PKN STAN, n.d.).

3. Peningkatan Kualitas Layanan

Penerapan *VFM* membantu dalam merumuskan spesifikasi *Output* yang jelas dan terukur, sehingga penyedia layanan, baik itu pemerintah maupun swasta, terdorong untuk meningkatkan pelayanan. Hal ini juga mendorong inovasi dalam penyampaian layanan public (Mahar Putro Dito, 2022)

4. Pengendalian Anggaran

Melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), *VFM* berfungsi sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Ini membantu dalam menghindari pola penyerapan anggaran yang tidak efisien, seperti "slow back-loaded expenditure" di mana realiasi suatu anggaran biasanya rendah di awal tahun dan mengalami kenaikan setiap akhir tahun (Mahar Putro Dito, 2022).

Penerapan konsep *Value for money* sangat penting bagi organisasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Dengan fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, *VFM* tidak hanya membantu dalam pengelolaan anggaran tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi tantangan dalam penerapan *VFM* serta dampaknya terhadap berbagai sektor layanan publik.

2.1.4 Tantangan dalam menerapkan *Value for money* di sektor Publik

Penerapan *Value for money* (*VFM*) di sektor publik menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam menerapkan *VFM*:

1. Ketersediaan data yang akurat dan memadai merupakan tantangan krusial. Banyak organisasi publik mengalami kesulitan dalam mengakses data yang lengkap dan terpercaya, yang sangat penting untuk analisis kinerja yang komprehensif. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesalahan interpretasi dan keputusan yang tidak efektif (Judijanto & Afandy, 2016)
2. Proses pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran sering kali kompleks. Hal ini melibatkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi, serta memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen anggaran. Kesulitan dalam memahami perbedaan antara rencana dan realisasi dapat menghambat evaluasi kinerja
3. Perubahan prioritas organisasi atau kondisi eksternal yang dinamis dapat memengaruhi pengukuran kinerja. Situasi ini dapat menyulitkan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi, karena faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi hasil
4. Pengukuran kinerja sering kali cenderung fokus pada *Output*, seperti overspending atau underspending, tanpa secara langsung mengevaluasi keberhasilan program atau pencapaian tujuan strategis yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap hasil akhir dari program yang dilaksanakan
5. Implementasi VFM memerlukan tingkat keterlibatan dan koordinasi yang tinggi di seluruh organisasi. Tanpa kolaborasi yang baik antar departemen,

sulit untuk memastikan data yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang anggaran serta hasil pengukuran

6. Kekurangan Sumber daya, tenaga kerja dan teknologi informasi.
7. Standar akuntansi di sektor publik sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga memerlukan keahlian khusus bagi para akuntan di lini pemerintahan. Kompleksitas ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan prinsip VFM secara konsisten (Al-Hakim & Harnovinsah, 2019)

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi organisasi sektor publik untuk terus berupaya meningkatkan sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas agar penerapan *Value for money* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

2.2 Pengelolaan Anggaran Publik

Menurut (Zahari et al., 2024) Pengelolaan anggaran publik berbicara tentang serangkaian proses yang saling terhubung untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan melibatkan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi sektor public. Anggaran ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan sebagai alat untuk mendukung perencanaan yang baik dan sebagai Kontrol pengeluaran suatu organisasi public.

Berikut merupakan Tujuan Pengelolaan Anggaran Publik antara lain:

1. Alokasi Sumber Daya

Dengan anggaran yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana digunakan untuk program-program yang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan khalayak umum terutama masyarakat.

2. Perencanaan dan Pengendalian

Sebagai sebuah alat dalam merumuskan tindakan, menghitung biaya, dan membuat target hasil yang sesuai harapan. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas

Pengelolaan anggaran publik juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Ini menciptakan transparansi dalam penggunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Stabilitas Ekonomi

Anggaran sektor publik juga berperan dalam stabilisasi ekonomi dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, anggaran dapat mendorong kemajuan ekonomi sebagai bentuk dukungan dari pembangunan sosial dan ekonomi (Fitria, 2017)

5. Prioritas Pembangunan

Anggaran memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pertumbuhan populasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di masyarakat

2.2. 1 Tantangan dalam Mengelola Anggaran Publik

Mengelola anggaran untuk proyek infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks diantaranya:

1. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan proyek, terutama di daerah yang memiliki pendapatan asli yang rendah dan minim alokasi dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dan kualitas infrastruktur yang tidak optimal. (Riefky, 2022)

2. Kompleksitas Proyek

Proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan terhubung dengan pemerintah pusat dan daerah, kontraktor, dan masyarakat. Koordinasi yang buruk antara pemangku kepentingan dapat menyebabkan kebuntuan dalam perencanaan. Selain itu, kompleksitas dalam manajemen risiko juga menjadi tantangan karena memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah (Fayza Novian¹, Nandito Olip S², Ilham Fauzan³, 2024)

3. Pengadaan Sumber Daya yang Efektif

Pengadaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur harus dilakukan secara efektif agar penggunaan anggaran optimal. Negosiasi dengan pemasok dan kontraktor serta analisis biaya yang mendalam sangat penting untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Namun, seringkali terdapat kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

4. Kualitas Perencanaan

Perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas infrastruktur. Seringkali, proyek dijalankan tanpa analisis kebutuhan yang komprehensif atau dokumen proyek yang berkualitas. Hal ini berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam estimasi biaya dan waktu pelaksanaan.

5. Ketahanan Terhadap Bencana

Tantangan ini menuntut adanya perencanaan dan desain infrastruktur yang memperhitungkan risiko bencana. Belum adanya standar ketahanan terhadap bencana yang jelas dapat menyulitkan pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa infrastruktur dapat bertahan dalam kondisi ekstrem.

6. Keterbatasan Tenaga Ahli

Kurangnya tenaga ahli di bidang konstruksi dan manajemen proyek juga menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran untuk proyek infrastruktur. Keterampilan teknis yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta meningkatkan risiko kesalahan

7. Koordinasi antar Lembaga.

Terdapat tantangan dalam koordinasi antara semua pihak yang terkait dalam pembangunan terkhusus infrastruktur. Tumpang tindih tanggung jawab dan birokrasi yang berbelit sering kali menghambat proses perizinan dan pelaksanaan proyek. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

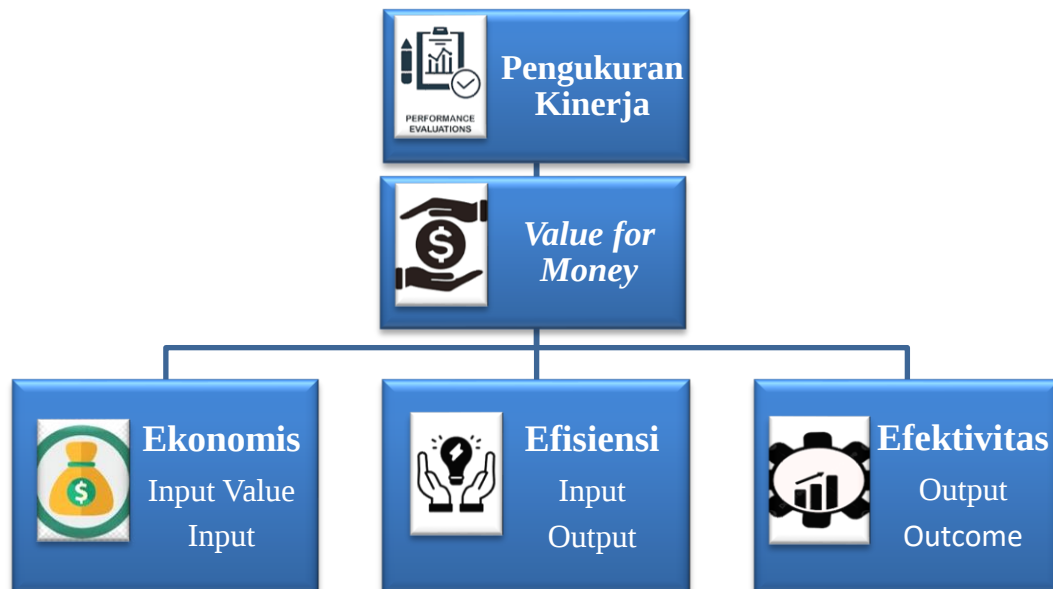
No	Judul	Penulis Dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021 (Hardiansyah, 2024)	Tomi Hardiansyah, 2024	Analisis Deskriptif	Elemen Ekonomis Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018-2021 Cukup Ekonomis. Elemen Efisiensi dengan Rasio Efisiensi Sebesar 90%-100% hasilnya Efisien. Elemen Efektivitas Kriteria Sangat Efektif dan rasio rata-rata diatas 100%.
2	Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep <i>Value for money</i> Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Pratama et al., 2022)	Versiandika Yudha Pratama ¹ , Syamsuddin ² , Farah Difa ³ , 2022	Kuantitatif Deskriptif	Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Selama Periode 2017-2019 Dikategorikan Ekonomis. Dari Sisi Efisiensi, Dikatakan Cukup Efisien, dan tahun 2018 Dan 2019 Belum Efisien. Efektivitas, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Selama Belum Maksimal Tetapi Sudah Cukup Efektif .

3	Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Sanjaya, 2019)	Maswar Patuh Priyadi , Ika Husni Sanjaya ,2019	kualitatif deskriptif	Tingkat efektivitas, efisien dan ekonomis telah sesuai dan harus tetap melakukan pengukuran kinerja lainnya yang masih sesuai dengan tujuan program dan kegiatan instansi terkait.
4	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money (Khikmah, 2016)	Alayyal Khikmah, 2014	Deskriptif Kuantitatif	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tidak Ekonomis namun Telah Efisien Dan Efektif. Hal Ini dapat diartikan jika Pemerintah Telah berusaha melakukan pengelolaan sumber daya sebaik mungkin.
5	Penerapan Konsep <i>Value for money</i> Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang (Rahayu, 2018)	Sri Rahayu, 2018	Deskriptif Kuantitatif	Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang Telah berada pada tingkat ekonomis, efisien dan efektivitas yang sesuai dengan harapan dalam konsep <i>value for money</i> .
6	Analisis Value For Money Pada Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Ambat et al., 2022)	Sicillia Ambat, Hendrik Manossoh, Lady Diana Latjandu, 2022	deskriptif kualitatif	BPKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah ekonomis, efisien, dan efektif.
7	Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja	Risa Dwi Agustin,	Deskriptif Kuantitatif	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berada

	Pelayanan Sektor Publik (Agustin & Subardjo, 2017)	Anang Subardjo, 2017		pada tingkat ekonomis, efisien dan efektif.
8	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money (Polii et al., 2020)	Immanuel R. A. Polii ¹ David P. E. Saerang ² Steven J. Tangkuman ³ , 2020	Penelitian Kualitatif	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2017 telah mencapai tingkat Ekonomis, Efisien, dan Cukup Efektif.
9	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money (Liando et al., 2014)	Harry Saputra Liando ¹ David Paul Elia Saerang ² Inggriani Elim, 2014	Deskriptif Kuantitatif	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih harus meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk selalu mencapai tujuan ekonomis, efektif dan efisien.
10	Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode <i>Value for money</i> Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021 (Tameon et al., 2023)	Alwin Fedianto Tameon, Sarinah Joyce Rafael, Linda Lomi Ga, 2023	Deskriptif Kuantitatif	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2021 Cukup Ekonomis, Efisien, dan Efektif hal ini dapat dikatakan bahwa instansi bersangkutan telah cukup baik mengelola keuangannya.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep



2.5 Definisi Operasional

Menurut (Mardiasmo, 2009), *VFM* mengedepankan penggunaan input yang minimal untuk mencapai hasil yang sesuai harapan, sehingga penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini dalam setiap program dan kebijakan. Sebelum menghitung nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja anggaran suatu organisasi, tentu harus diperhatikan komponen-komponen yang sangat penting dalam menghitungnya.

Menurut (Mahmudi, 2007) Persentase Nilai *Output*, *Outcome* dan *Input* diperoleh melalui penerapan rumus yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Perhitungan *Input*, *Output* dan *Outcome*

Nilai Kinerja	Rumus
Nilai Kinerja <i>Input</i>	$\frac{\text{Capaian Kinerja Input}}{\text{Target Kinerja Input}} \times 100\%$
Nilai Kinerja <i>Output</i>	$\frac{\text{Capaian Kinerja Output}}{\text{Target Kinerja Output}} \times 100\%$
Nilai Kinerja <i>Outcome</i>	$\frac{\text{Capaian Kinerja Outcome}}{\text{Target Kinerja Outcome}} \times 100\%$

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015.

Tabel 2. 6 Definisi Operasional

Kriteria Kinerja	Rumus	Nilai Kinerja	Keterangan
Ekonomi	$\frac{\text{Input rencana(anggaran)}}{\text{Input Realisasi (Capaian)}} \times 100\%$	>100%	Ekonomis
		85-100%	Cukup Ekonomis
		65-84%	Kurang Ekonomis
		65%	Tidak Ekonomis
Efisiensi	$\frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$	<90%	Sangat Efisien
		90-99%	Efisien
		100%	Cukup Efisien
		>100%	Tidak Efisien
Efektivitas	$\frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$	$\geq 100\%$	Efektif
		85-99%	Cukup Efektif
		65-84%	Kurang Efektif
		$\geq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2007) Buku Edisi ke 3 oleh Mahmudi, 2015

